

# Rekonstruksi Konsep Manusia dalam Perspektif Islam: Implikasi terhadap Penguatan Martabat Bangsa Indonesia

Arif Wibowo<sup>1\*</sup>, Kenes Cahyaningrum<sup>1</sup>, Atika Khairunnisa<sup>1</sup>, Najlatul Khairiyah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Diponegoro

\*Corresponding Email: arifwibowo050485@gmail.com

## ABSTRACT

*This study aims to reconstruct the concept of humanity from an Islamic perspective and examine its implications for strengthening the dignity of the Indonesian nation amid the moral, social, and ecological crises afflicting modern society. This study uses a qualitative method with a library research approach through analysis of primary sources such as the Qur'an, Hadith, and the works of classical and contemporary Islamic thinkers, including Al-Ghazali, Ismail Raji al-Faruqi, and Fazlur Rahman, which are compared with the thoughts of Western philosophers such as Aristotle, Descartes, Kant, Heidegger, and Foucault. Data analysis was conducted using content analysis and descriptive-analytical analysis to find a synthesis between theological and philosophical views on the nature, purpose, and responsibilities of humans. The results of the study show that humans in the Islamic perspective have two main dimensions, namely as 'abdullah (servants of Allah) and khalifah fi al-ardh (representatives of God on earth), which emphasise a balance between vertical and horizontal responsibilities. Awareness of these two dimensions forms the basis for the formation of Indonesian people who are righteous as individuals and reformers in society, as well as the foundation for the development of a just, ethical, and sustainable national civilisation. Thus, strengthening the dignity of the Indonesian nation can only be achieved through the reconstruction of human consciousness rooted in the values of divinity, universal humanity, and Pancasila nationalism.*

**Keywords:** *humanity, Islamic perspective, human dignity, khalifah fil ardhi, Pancasila*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep manusia dalam perspektif Islam serta menelaah implikasinya terhadap penguatan martabat bangsa Indonesia di tengah krisis moral, sosial, dan ekologis yang melanda masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta karya para pemikir Islam klasik dan kontemporer, di antaranya Al-Ghazali, Ismail Raji al-Faruqi, dan Fazlur Rahman, yang dibandingkan dengan perspektif Islam memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai 'abdullah (hamba Allah) dan khalifah fi al-ardh (wakil Tuhan di bumi), yang menegaskan tanggung jawab vertikal dan horizontal secara seimbang. Kesadaran atas kedua dimensi ini menjadi dasar pembentukan manusia Indonesia yang *shalih* secara individu dan *muslih* secara sosial, sekaligus fondasi bagi pembangunan peradaban bangsa yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan martabat bangsa Indonesia hanya dapat dicapai melalui rekonstruksi kesadaran kemanusiaan yang berakar pada nilai-

nilai ketuhanan, pemikiran filsuf Barat seperti Aristoteles, Descartes, Kant, Heidegger, dan Foucault. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis untuk menemukan sintesis antara pandangan teologis dan filosofis mengenai hakikat, tujuan, dan tanggung jawab manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa manusia dalam kemanusiaan universal, dan kebangsaan Pancasila.

**Kata kunci:** *Manusia, Perspektif Islam, Martabat manusia, Khalifah fil ardhi, Pancasila*

## PENDAHULUAN

Secara ideal, manusia dalam pandangan Islam menempati posisi yang sangat luhur sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang diberi potensi akal, hati, dan ruh Ilahi untuk menjalankan amanah sebagai *'abdullah* (hamba Allah) sekaligus *khalifah fi al-ardh* (wakil Tuhan di bumi). Kedua peran ini menjadikan manusia memiliki tanggung jawab vertikal kepada Tuhan dan tanggung jawab horizontal terhadap sesama manusia serta alam semesta (Ismail Raji Al-Faruqi 1992). Dalam kerangka ini, martabat manusia tidak hanya diukur dari aspek rasionalitas dan kemampuan material, tetapi juga dari dimensi spiritual, moral, dan sosial yang harmonis (Ghazali 2005). Konsep ideal ini sejatinya menjadi fondasi dalam membangun peradaban bangsa yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan adanya jarak yang lebar antara nilai ideal kemanusiaan dalam Islam dan kondisi faktual masyarakat modern. Krisis multidimensi seperti korupsi, intoleransi, disintegrasi sosial, dan kerusakan lingkungan menjadi indikator nyata tergerusnya martabat manusia Indonesia. Penelitian terbaru oleh Nurasyia, Akbar, & Putra, mengungkap bahwa lemahnya kesadaran spiritual dan etika publik berkorelasi signifikan dengan meningkatnya perilaku koruptif di kalangan aparatur sipil dan mahasiswa, menandakan terjadinya degradasi moral yang sistemik (Fauziyah 2023). Di sisi lain, fenomena intoleransi dan polarisasi politik berbasis identitas sebagaimana dikaji Menchik menunjukkan bahwa keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan justru sering berubah menjadi sumber konflik sosial (Jeremy Menchik 2016). Sementara itu, krisis ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa batas juga mencerminkan hilangnya kesadaran manusia sebagai khalifah yang berkewajiban menjaga keseimbangan alam (Hakim 2021).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya *disorientasi konseptual* mengenai hakikat manusia dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial. Banyak kebijakan pembangunan masih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi mengabaikan dimensi etis dan spiritual yang menjadi inti kemanusiaan. Akibatnya, pembangunan nasional berjalan tanpa arah moral yang jelas dan gagal menumbuhkan manusia Indonesia yang berintegritas serta berkepribadian luhur. Hal ini menunjukkan adanya gap akademik dan praktis, yaitu belum adanya rekonstruksi konseptual yang komprehensif tentang manusia

Indonesia yang berakar pada nilai-nilai teologis Islam, tetapi juga relevan dengan realitas kebangsaan kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu memang telah membahas dimensi manusia dan martabatnya, tetapi dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Seyyed Hossein Nasr, misalnya, menekankan aspek spiritualitas manusia dan bahaya dehumanisasi akibat sekularisme modern, namun belum mengaitkannya dengan konteks kebangsaan Indonesia (Seyyed Hossein Nasr 2016). Muhammad Kamil mengkaji konsep *insan kāmil* dalam filsafat pendidikan Islam, tetapi lebih menitikberatkan pada pembentukan individu ideal, bukan pada dimensi sosial-politik manusia dalam kehidupan berbangsa (Kamil, 2018). Sementara itu, Rahman menyoroti pentingnya martabat manusia sebagai basis etika dan hak asasi, tetapi belum mengintegrasikannya dalam kerangka pembangunan karakter bangsa (Fazlur Rahman 1983). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun isu kemanusiaan telah banyak dibahas, belum banyak kajian yang menghubungkan antara konsep teologis tentang manusia dalam Islam dengan tantangan aktual bangsa Indonesia, baik dari aspek moral, sosial, maupun ekologis.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan melakukan rekonstruksi konseptual atas pandangan Islam mengenai manusia sebagai *'abdullah* dan *khalifah fi al-ardh* serta mengaitkannya dengan penguatan martabat bangsa Indonesia dalam kerangka Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Kajian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif-reflektif, dengan tujuan merumuskan paradigma kemanusiaan yang integral: manusia yang *shalih* secara individu dan *muslih* secara sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan akademik dan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan filsafat manusia dalam Islam yang kontekstual, sekaligus menawarkan model konseptual untuk pendidikan karakter dan pembangunan bangsa yang berlandaskan nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini berfokus pada penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber literatur yang relevan untuk merekonstruksi konsep manusia dalam perspektif Islam serta implikasinya terhadap penguatan martabat bangsa Indonesia. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya pemikir Islam seperti Al-Ghazali, Ismail Raji al-Faruqi, dan Fazlur Rahman, yang dikomparasikan dengan pemikiran filsuf Barat seperti Aristoteles, Descartes, Kant, Heidegger, dan Foucault (Ismail Raji Al-Faruqi 1992). Sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema filsafat manusia, teologi Islam, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia (Seyyed Hossein Nasr 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dengan cara menelusuri, membaca,

dan mencatat secara sistematis konsep-konsep kunci seperti *fitrah*, *khalifah fil ardhi*, *'ibadah*, dan martabat manusia (M. Solihin, 2020). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis untuk menafsirkan makna teks-teks keagamaan dan filosofis secara mendalam (Denzin, 2018). Untuk menjaga keabsahan hasil kajian, digunakan teknik triangulasi sumber dan konsep, yakni dengan membandingkan berbagai pandangan klasik dan modern agar diperoleh pemahaman yang komprehensif, kontekstual, dan aplikatif bagi pembangunan manusia yang bermartabat (Creswell, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Manusia Dalam Pandangan Filsafat Barat

Dalam filsafat Barat, manusia dipahami terutama dari sudut rasionalitas dan kebebasan eksistensial. Plato menekankan peran jiwa rasional yang memungkinkan manusia mencapai pengetahuan dan kebijaksanaan. Aristoteles melihat manusia sebagai makhluk rasional sekaligus sosial, yang hidupnya bertujuan mencapai kebahagiaan melalui kebajikan. Kant menyoroti manusia sebagai makhluk bermoral yang memiliki akal budi untuk menetapkan kewajiban etis. Sementara itu, pemikir modern seperti Nietzsche dan para eksistensialis (Sartre, Camus) menekankan kebebasan, tanggung jawab, dan pencarian makna hidup (Fauziyah 2023).

Pemikiran Barat telah melahirkan beragam konsepsi tentang manusia (*anthropos*), yang terus berevolusi sepanjang sejarah dan membentuk cara manusia modern memandang dirinya sendiri. Tinjauan ini akan menelusuri perkembangan konsep tersebut dari era klasik, modern, hingga kontemporer, untuk memberikan peta konseptual yang komprehensif. Secara umum, filsafat Barat menggambarkan manusia sebagai makhluk bebas yang membentuk dirinya melalui pilihan dan tindakan. Konsep seperti *eksistensi mendahului esensi* (Sartre) menegaskan bahwa manusia tidak ditentukan oleh kodrat bawaan, tetapi oleh keputusan yang diambilnya. Dengan demikian, filsafat Barat lebih menitikberatkan pada aspek rasionalitas, otonomi individu, serta pencarian makna hidup secara personal, berbeda dengan Islam yang menekankan *fitrah* dan keterikatan dengan Allah.

Pemahaman mendasar tentang manusia dalam tradisi Barat dimulai dengan filsafat Yunani Kuno. Aristoteles (384-322 S+M) dalam karya *De Anima (On the Soul)* mendefinisikan manusia sebagai *zoon logon echon* (Yunani) atau *animal rationale* (Latin), yang berarti "*hewan yang memiliki akal budi*" (Aristoteles 1986). Bagi Aristoteles, jiwa (*psyche*) memiliki hierarki, di mana jiwa vegetatif (nutrisi, pertumbuhan) dimiliki tumbuhan, jiwa sensitif (persepsi, nafsu) dimiliki hewan, dan jiwa rasional (berpikir, penalaran) adalah pembeda spesifik manusia. Akal budi inilah yang memungkinkan manusia memahami prinsip-

prinsip universal, beretika, dan hidup dalam polis (negara-kota). Konsep ini menempatkan martabat manusia pada kapasitas intelektualnya.

Pandangan klasik ini kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh filsuf Abad Pertengahan seperti Thomas Aquinas (1225-1274). Aquinas mensintesisasikan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristen. Baginya, akal budi adalah anugerah Tuhan yang memampukan manusia untuk berpartisipasi dalam hukum abadi (*lex aeterna*) melalui hukum natural (*lex naturalis*). Martabat manusia, oleh karena itu, bersumber dari kemampuannya untuk mengenal kebenaran dan melalui akal budinya, mengenal Tuhan (Aquinas 2020). Dalam perspektif ini, manusia adalah makhluk yang mencari tujuan tertinggi (*telos*), yaitu kebahagiaan sejati yang ditemukan dalam persatuan dengan Tuhan.

Pergeseran paradigmatik terjadi pada era René Descartes (1596-1650). Dalam *Meditations on First Philosophy* (1641), Descartes meragukan segala sesuatu yang dapat diragukan untuk menemukan fondasi pengetahuan yang pasti. Ia sampai pada kesimpulan yang terkenal: *Cogito, ergo sum* (Aku berpikir, maka aku ada) (Descartes 1993). Diri (*the self*) yang disimpulkan di sini adalah substansi yang berpikir (*res cogitans*), yang sepenuhnya terpisah dari dunia materi dan tubuh (*res extensa*).

Pemikiran Descartes ini meletakkan dasar bagi individualisme dan otonomi subjek modern. Manusia ditempatkan sebagai subjek otonom yang sadar diri (*self-conscious subject*), yang keberadaannya dan kebenaran yang diketahuinya didasarkan pada aktivitas kesadarannya sendiri, bukan pada otoritas eksternal seperti agama atau tradisi. Immanuel Kant (1724-1804) kemudian mengembangkan otonomi ini lebih jauh dalam ranah moral. Dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morcs* (Kant 2002), Kant berargumen bahwa martabat manusia (*würde*) bersumber pada kapasitas rasionalnya untuk memberikan hukum moral kepada dirinya sendiri (otonomi kehendak), yang membuatnya bukan sekadar alat (*means*), melainkan selalu merupakan tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*). Manusia, bagi Kant, adalah makhluk otonom yang menjadi sumber nilai dan hukum moral.

Filsafat abad ke-20 menyaksikan berbagai reaksi kritis terhadap konsep subjek otonom yang rasional dari era modern. Martin Heidegger (1889-1976) dalam *Being and Time* menawarkan analisis eksistensial tentang manusia, yang disebutnya *Dasein* (berada-di-sana). *Dasein* bukanlah subjek yang terisolasi, melainkan selalu sudah berada-dalam-dunia (*being-in-the-world*). Keberadaannya ditandai oleh keterlemparan (*Geworfenheit*), ia menemukan dirinya sudah berada dalam dunia yang tidak dipilihnya, dengan sejarah dan budaya tertentu. Namun, *Dasein* juga memiliki proyeksi ia memahami dirinya dalam rangka kemungkinan-kemungkinan masa depannya (Heidegger 1962). Konsep Heidegger ini mendekonstruksi gagasan subjek yang berdaulat penuh dan menekankan pada kontekstualitas dan keterbatasan eksistensi manusia.

Pemikiran postmodern, seperti yang diwakili oleh Michel Foucault (1926- 1984), bahkan lebih radikal dalam mengkritik subjek modern. Foucault berpendapat bahwa

"manusia" sebagaimana kita pahami bukanlah realitas abadi, melainkan sebuah konstruksi sejarah yang baru berumur sekitar dua abad, yang terkait dengan formasi kekuasaan/pengetahuan (*power/knowledge*) modern. Dalam *The Order of Things* (1966), ia bahkan menubuatkan bahwa "manusia akan dilupakan, seperti wajah yang dihapus di tepi pantai" (Michel Foucault 1970). Bagi Foucault, subjek bukanlah sumber otonom dari makna, tetapi justru diproduksi melalui wacana, institusi, dan praktik sosial yang tersebar. Kritik ini mereduksi manusia dari subjek yang berdaulat menjadi efek dari struktur yang lebih besar, sekaligus membuka ruang untuk memahami fluiditas dan ketidakstabilan identitas manusia (Mansfield 2000).

Tinjauan terhadap evolusi pemikiran Barat menunjukkan sebuah spektrum yang luas: dari manusia yang didefinisikan oleh esensi rasionalnya (Aristoteles), kepada subjek otonom yang menjadi pusat (Descartes, Kant), hingga pada dekonstruksi terhadap subjek tersebut (Heidegger, Foucault). Berbagai perspektif ini memberikan alat analisis yang berharga. Konsep *animal rationale* dan otonomi *Kantian* menawarkan dasar untuk memahami martabat intrinsik manusia. Sementara itu, kritik Heideggerian dan Foucaultian memberikan koreksi yang krusial terhadap ilusi otonomi absolut, dengan mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang *terembedded* dalam konteks sosial, budaya, dan historis yang membentuknya. Bagi penelitian ini, sintesis dari kedua kutub ini penting: manusia dipandang sebagai entitas yang memiliki potensi rasional dan moral yang mulia (sebagai landasan martabat), namun sekaligus menyadari bahwa potensi ini selalu diaktualisasikan dalam kondisi keterbatasan dan dalam jaringan relasi kekuasaan yang kompleks, yang dapat menyebabkan alienasi dan dehumanisasi seperti yang terjadi dalam kapitalisme ekstrem dan krisis ekologis.

### Manusia dalam Kajian Islam

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah kunci untuk menyebut manusia, yang masing-masing mengungkap dimensi yang berbeda: (1). *Al Basyar*. Istilah ini menekankan aspek biologis-fisik manusia. Kata *basyar* berasal dari akar kata yang bermakna "kulit", mengisyaratkan penampakan fisik. Sebagai *basyar*, manusia adalah makhluk alamiah yang memiliki kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan berkembang biak (QS. Al-Kahf: 110). Penciptaannya dari tanah (QS. Al-Hijr: 28) menegaskan keterhubungannya dengan alam semesta dan kesederhanaannya sebagai makhluk fana. Konsep ini mengingatkan manusia akan asal-usulnya, sehingga tidak berlaku sombong dan angkuh. (2). *Al Insan*. Berbeda dengan *basyar*, istilah *insan* lebih menekankan pada aspek psikologis-intelektual dan potensi kemanusiaannya. Kata ini dikaitkan dengan kemampuan untuk berpikir, belajar, dan berbudaya. Ayat pertama yang turun, *Iqra* (Bacalah!) (QS. Al-'Alaq: 1-5), ditujukan kepada *insan*. Hal ini menunjukkan bahwa potensi akal dan ilmu pengetahuan adalah karakteristik sentral dari *insan*. Selain akal, *insan* juga memiliki *qalb* (hati), yang menjadi

pusat kesadaran spiritual, moral, dan emosional (QS. Al-Hajj: 46). Seorang ahli pendidikan Islam menyatakan bahwa konsep *insan* inilah yang menjadi landasan bagi pengembangan pendidikan manusia seutuhnya, yang memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual (Abuddin Nata 2016). (3). *Bani Adam*. Istilah ini menegaskan martabat dan kehormatan asasi yang dianugerahkan Tuhan kepada seluruh keturunan Adam, tanpa memandang suku, bangsa, atau status sosial. Dalam QS. Al-Isra': 70, Allah berfirman, "Dan sungguh, telah Kami muliakan anak-cucu Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan." Ayat ini menjadi landasan teologis untuk konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam, yang menolak segala bentuk rasialisme, diskriminasi, dan penindasan. Konsep Bani Adam ini sangat relevan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui kemuliaan dan kesetaraan setiap warga bangsa.

Berbeda dengan pendekatan filsafat Barat yang sering kali bersifat antroposentris dan sekular, pemikiran Islam mendefinisikan manusia secara integral dalam kerangka ketuhanan (*teosentris*). Konsep manusia tidak dapat dipisahkan dari relasinya dengan Allah SWT sebagai Pencipta, yang memberikan tujuan, martabat, dan tanggung jawab. Dalam filsafat ketuhanan, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi akal dan kesadaran untuk mencari kebenaran tentang Tuhan. Filsafat ketuhanan (*teologi naturalis*) berusaha membuktikan keberadaan Tuhan melalui akal dan penalaran, bukan hanya melalui wahyu. Beberapa jalan pembuktian yang digunakan adalah argumen ontologis (eksistensi Tuhan sebagai wujud mutlak), kosmologis (adanya pencipta pertama bagi alam), teleologis (keteraturan alam menunjukkan adanya pengatur), moral (dorongan etis dalam diri manusia menunjuk pada Tuhan), serta estetika/keindahan (keindahan alam menjadi tanda kekuasaan Tuhan) (Hakim 2021).

Manusia dalam pandangan ini memiliki kedudukan istimewa karena dengan akalnya ia bisa menangkap tanda-tanda keberadaan Tuhan melalui ciptaan-Nya. Meski begitu, akal manusia tetap terbatas, sehingga wahyu tetap diperlukan untuk memahami Tuhan secara lebih utuh. Kesimpulannya, filsafat ketuhanan menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang mampu berfilsafat tentang Tuhan, tetapi tetap harus menyadari keterbatasannya dan mengakui ke-Maha Kuasaan Allah. Berikut adalah konsep-konsep kunci tentang manusia dalam *worldview* Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan elaborasi para filsuf serta cendekiawan Muslim.

Pemikiran Islam memandang manusia sebagai entitas yang terdiri dari dua unsur yang menyatu: unsur material (*jasadiyah*) dan unsur immaterial (*ruhaniyah*). Unsur material berasal dari tanah (*turab*), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran ayat 59: "Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berfirman kepadanya: "Jadilah!" maka

jadilah sesuatu itu." Namun, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah ditiupkannya ruh (*nafkh al-ruh*) yang berasal dari Allah SWT, seperti termaktub dalam Surah As-Sajdah ayat 9: "Kemudian Dia menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya...". Kombinasi unik antara tanah dan *ruh ilahi* ini menciptakan tarik-menarik dialektis dalam diri manusia. Di satu sisi, manusia memiliki kecenderungan materialistik dan rendah (*nafs al-ammarah bis-su'*) yang berasal dari unsur tanah. Di sisi lain, manusia memiliki potensi ketuhanan dan kecerdasan spiritual yang luhur yang bersumber dari ruh. Potensi inilah yang memungkinkannya untuk mengenal Tuhannya dan naik ke derajat yang paling tinggi (*ahsan taqwim*) (Q.S. At-Tin: 4-5). Konsep dualistik ini menjadi fondasi bagi seluruh bangunan etika dan pendidikan dalam Islam, yang bertujuan untuk memenangkan dan mengarahkan potensi ruhaniyah untuk mengendalikan kecenderungan jasmaniyah yang rendah (Seyyed Hossein Nasr 2016).

Konsep sentral lainnya yang mendefinisikan manusia dan tanggung jawabnya adalah *khalifah*. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 30: "Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Status sebagai khalifah bukan sekadar gelar kehormatan, melainkan sebuah amanah (*trust*) yang sangat berat (Q.S. Al-Ahzab: 72) untuk mengelola dan memakmurkan bumi (*imarat al-ard*) sesuai dengan kehendak dan hukum-hukum Allah (Ismail Raji Al-Faruqi 1992). Konsep kekhalifahan ini memberikan landasan teologis yang kokoh bagi tanggung jawab ekologis, sosial, dan moral manusia. Sebagai wakil Tuhan, manusia diberi wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi dengan syarat harus dilakukan secara berkeadilan, seimbang, dan tidak berlebihan (*islah*, bukan *ifsad*). Hal ini menjawab langsung krisis ekologis yang bersumber pada eksploitasi tanpa batas. Secara sosial, kekhalifahan menuntut manusia untuk menegakkan keadilan, memberantas kemungkar, dan memimpin dengan bijaksana, yang merupakan antitesis dari korupsi dan disintegrasi sosial (Kamali 2011). Martabat manusia, dalam perspektif ini, diperoleh bukan melalui klaim otonomi, melainkan melalui pengabdian dan pelaksanaan amanah kekhalifahan ini secara bertanggung jawab.

Jika konsep *khalifah* menekankan pada tanggung jawab horizontal (manusia-alam-sesama), maka konsep 'abdullah (hamba Allah) menekankan pada relasi vertikal yang merupakan sumber martabat yang sesungguhnya. Tujuan penciptaan manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Az-Zariyat ayat 56, adalah untuk beribadah kepada-Nya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." Ibadah dalam pengertian ini tidak terbatas pada ritual formal (shalat, puasa), melainkan mencakup seluruh aktivitas kehidupan yang dilakukan dengan niat mencari ridha Allah dan sesuai dengan syariat-Nya. Dalam pandangan filsuf seperti Al-Ghazali (1058-1111), puncak dari martabat manusia adalah mencapai ma'rifatullah (mengenal Allah) dan kedekatan dengan-Nya (*taqarrub*). Status sebagai hamba justru merupakan

kemuliaan tertinggi karena ia mengakui ketergantungan mutlak pada Yang Maha Mutlak, membebaskan manusia dari penghambaan pada sesama makhluk, ideologi, atau hawa nafsunya sendiri (Fazlur Rahman 1983). Kesadaran sebagai *'abd* inilah yang menjadi pengendali utama bagi seorang khalifah, sehingga kekuasaan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk korupsi atau tirani.

### **Implikasi Rekonstruksi Manusia Terhadap Penguatan Martabat Berbangsa Indonesia**

Rekonstruksi konsep manusia sebagai makhluk multidimensi dengan tujuan ibadah dan tugas khalifah yang holistik, bukanlah wacana teoretis semata. Konsep ini memiliki daya transformatif yang kuat untuk membangun martabat bangsa Indonesia di tengah percaturan global. Al-Qur'an memberikan jawaban yang tegas dalam satu ayat: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (QS. Az-Zariyat: 56). Pemahaman yang parsial terhadap ayat ini dapat melahirkan spiritualitas yang tertutup dan individualis. Oleh karena itu, ini perlu penguraian makna ibadah yang komprehensif, yang terwujud dalam dua misi utama: pengabdian vertikal (*'ibadah*) dan pemakmuran horizontal (*'imarah/muamalah*).

Pertanyaan fundamental tentang "*untuk apa manusia diciptakan*" telah dijawab secara tegas oleh Al-Qur'an melalui firman Allah SWT dalam Surah Az-Zariyat ayat 56: "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.*" Namun, pemahaman yang parsial terhadap ayat ini kerap melahirkan spiritualitas yang sempit dan individualistis, seolah ibadah hanya terbatas pada ritual formal semata. Padahal, dalam pandangan Islam, ibadah memiliki makna yang komprehensif yang mencakup seluruh aktivitas manusia yang diniatkan untuk mencari keridaan Allah SWT. Dengan demikian, tujuan penciptaan manusia sejatinya mencakup dua misi besar yang saling berkaitan: pengabdian vertikal kepada Allah (*'ibadah*) dan pemakmuran horizontal terhadap bumi (*'imarah*) (Ismail Raji Al-Faruqi 1992).

Secara linguistik, kata *'ibadah* berasal dari akar kata *'abada* yang berarti tunduk, patuh, dan mengabdikan. Secara terminologis, menurut Yusuf Al-Qardhawi, *'ibadah* adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, lahir maupun batin (Yusuf Al Qardhawi 2001). Dengan demikian, *'ibadah* merupakan tujuan eksistensial manusia untuk merealisasikan ketundukan totalitas dirinya—akal, hati, dan jasmani—kepada kehendak Ilahi. Dalam konteks sosial kebangsaan, pemahaman ini menjadi fondasi kesalehan individu yang melahirkan integritas spiritual (*spiritual integrity*). Sebagaimana ditegaskan oleh Abuddin Nata, internalisasi nilai ibadah yang sejati akan membentuk pribadi yang memiliki kesadaran *muraqabah*, yaitu perasaan selalu diawasi oleh Allah SWT, yang menjadi benteng moral dari perilaku koruptif dan manipulative (Abuddin Nata 2016).

Dalam Islam, ibadah mencakup dua dimensi utama. Pertama, *'ibadah mahdhah* (ibadah khusus), seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, yang tata caranya telah ditentukan secara baku oleh syariat. Fungsi ibadah ini adalah menjaga hubungan spiritual antara hamba dan Tuhannya serta menumbuhkan energi moral untuk aktivitas duniawi. Kedua, *'ibadah ghairu mahdhah* (ibadah umum), yakni segala aktivitas duniawi yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Dalam perspektif ini, bekerja, belajar, berkeluarga, meneliti, mengajar, bahkan menyingkirkan duri di jalan pun termasuk ibadah jika diniatkan untuk mencari ridha Allah. Sebuah penelitian oleh Jamrah menunjukkan bahwa pemahaman ibadah yang luas ini mampu meningkatkan etos kerja dan tanggung jawab sosial umat Islam secara signifikan (Jamrah, 2019). Dengan demikian, *'ibadah* bukanlah bentuk pengasingan diri dari dunia, tetapi orientasi spiritual yang menjiwai seluruh aktivitas manusia.

Selanjutnya, dimensi horizontal dari penciptaan manusia terwujud dalam konsep *'imārah*, yakni tugas memakmurkan bumi sebagai konsekuensi logis dari ibadah yang benar. Allah SWT berfirman: "*Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya.*" (QS. Hud: 61). Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan tidak hanya untuk beribadah dalam arti ritual, tetapi juga untuk mengelola bumi dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. *'Imārah* dalam hal ini mencakup seluruh dimensi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang jika dijalankan dengan niat ikhlas dan etika syar'i, menjadi bagian dari ibadah itu sendiri. Riyadi menegaskan bahwa *'imārah* adalah tanggung jawab kolektif umat manusia untuk membangun peradaban yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar kemajuan materia (A. K. Riyadi 2020).

Dalam konteks kekinian, *'imārah* memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, *'imārah al-'aql* (pemakmuran akal), yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi demi kemaslahatan tanpa merusak tatanan alam. Kedua, *'imārah al-ijtimā'iyah* (pemakmuran sosial-ekonomi), yang diwujudkan melalui keadilan distribusi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan sistem ekonomi yang etis. Ketiga, *'imārah as-siyāsiyyah* (pemakmuran politik-hukum), yakni menegakkan sistem hukum yang adil, memerangi korupsi, dan melindungi hak-hak warga negara. Dengan demikian, *'ibadah* dan *'imārah* merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, *'ibadah* memberikan landasan spiritual dan moral, sementara *'imārah* menjadi arena aktualisasi nilai-nilai tersebut. Penelitian lapangan oleh (Fithriani 2022) menunjukkan bahwa pemahaman integratif antara kedua konsep ini meningkatkan etos kerja, kejujuran, dan tanggung jawab sosial komunitas wirausaha Muslim, sehingga berdampak nyata pada pembentukan karakter bangsa yang produktif dan berakhlak.

Status manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* (wakil Allah di bumi) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 30 adalah puncak kemuliaan sekaligus beban tanggung

jawab eksistensial. Amanah kekhalifahan ini, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahza: 72, merupakan tanggung jawab berat yang meliputi tiga dimensi utama: teologis, sosiologis, dan ekologis. Ahyani menjelaskan bahwa tanggung jawab kekhalifahan bersifat *tripartit*, yakni relasi dengan Tuhan (*hablun min Allah*), dengan manusia (*hablun min an-nas*), dan dengan alam semesta (*hablun ma'al-'alam*) (M. Ahyani 2020).

Secara teologis, manusia sebagai khalifah berkewajiban merepresentasikan sifat-sifat Allah seperti *Al-'Adl* (Maha Adil), *Ar-Rahman* (Maha Pengasih), dan *Al-Hakim* (Maha Bijaksana) dalam setiap aspek kehidupannya. Kepemimpinan yang adil, kebijakan yang penuh kasih, dan keputusan yang bijak merupakan cerminan nyata dari nilai-nilai ilahiah tersebut. Kesadaran bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan Allah (*muraqabah*) dan akan dipertanggungjawabkan (*hisab*) di akhirat menjadi mekanisme kontrol moral paling kuat. Penelitian oleh Zulkifli dan Hassan menunjukkan bahwa kesadaran *muraqabah* secara signifikan meningkatkan pengendalian diri dan menekan perilaku menyimpang di kalangan remaja Muslim (Ahmad Zulkifli 2001). Dalam konteks kebangsaan, tanggung jawab teologis ini menuntun terbentuknya Indonesia yang bertakwa—yakni bangsa yang menjadikan nilai ketuhanan sebagai dasar kebijakan publik, menjauhi korupsi, dan menegakkan keadilan sosial.

Tanggung jawab sosiologis menekankan hubungan horizontal antar manusia yang berkeadaban. Manusia sebagai khalifah wajib menegakkan keadilan (*al-'adl*) tanpa diskriminasi (QS. Al-Ma'idah: 8), menjalankan amar ma'ruf nahi munkar (QS. Ali Imran: 110), serta memelihara ukhuwah (persaudaraan) di antara sesama manusia. Nilai ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang majemuk. Penelitian oleh Sari dan Pratama menunjukkan bahwa internalisasi nilai *ukhuwah wathaniyah* dalam pendidikan dapat menekan gejala radikalisme dan meningkatkan toleransi pelajar terhadap perbedaan (Sari and R. Pratama 2022). Dengan demikian, tanggung jawab sosiologis melahirkan Indonesia yang berkeadilan, beradab, dan bersatu.

Sementara itu, tanggung jawab ekologis merupakan manifestasi dari kesadaran manusia sebagai penjaga bumi. Prinsip *taskhīr* (penundukan alam) yang disebut dalam QS. Ibrahim: 32–33 bukanlah legitimasi eksploitasi, melainkan mandat pengelolaan yang bertanggung jawab. Islam menekankan *mīzān* (keseimbangan) dalam pemanfaatan sumber daya (QS. Ar-Rahman: 7–9) dan melarang segala bentuk kerusakan (*fasād*) (QS. Al-A'raf: 56). Hakim (2021) dalam studinya tentang ekoteologi Islam menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual dapat menjadi dasar gerakan konservasi lingkungan yang efektif, karena menggabungkan kesadaran ekologis dengan dimensi ibadah. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, tanggung jawab ekologis menjadi prasyarat bagi kedaulatan dan kelestarian bangsa.

Rekonstruksi konsep manusia dalam perspektif Islam memiliki daya transformatif yang kuat bagi pembentukan martabat bangsa Indonesia. *Pertama*, pada level individu,

konsep manusia sebagai *'abd* dan *khalīfah* membentuk karakter manusia yang *shāliḥ* secara personal, yaitu berakhlak mulia, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Kesadaran bahwa hidup adalah amanah ilahi menumbuhkan integritas yang menjadi fondasi moral untuk melawan korupsi dan penyimpangan sosial. *Kedua*, pada tataran sosial, kesalehan individu harus bermuara pada kesalehan sosial. Bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan persaudaraan adalah cerminan masyarakat madani (*civilized society*) yang beradab. Prinsip keadilan dan persaudaraan universal yang tertanam dalam konsep kekhalifahan dapat memperkuat semangat *Bhinneka Tunggal Ika* dan memperkokoh solidaritas kebangsaan.

*Ketiga*, dalam dimensi kebangsaan dan kebijakan publik, rekonstruksi konsep manusia yang berlandaskan *'ibadah* dan *'imārah* bersinergi secara harmonis dengan nilai-nilai Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan prinsip tauhid; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mencerminkan konsep *karāmah insāniyyah*; Persatuan Indonesia sejalan dengan nilai ukhuwah; sementara Keadilan Sosial adalah tujuan etis dari kekhalifahan manusia. Bahkan, nilai-nilai kearifan lokal seperti *tepo seliro* di Jawa, *siri'* di Bugis, dan *pela gandong* di Maluku memiliki semangat yang sejalan dengan amar ma'ruf nahi munkar dan persaudaraan universal dalam Islam. Penelitian kebijakan oleh (Y. Nurhidayat 2023) menegaskan bahwa pendidikan karakter bangsa di masa depan perlu mengintegrasikan tiga dimensi tanggung jawab kekhalifahan—teologis, sosial, dan ekologis—ke dalam kurikulum pendidikan nasional untuk membentuk sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki *spiritual strength*, *social responsibility*, dan *environmental awareness*.

Dengan demikian, rekonstruksi konsep manusia dalam Islam bukan sekadar refleksi teologis, melainkan fondasi filosofis bagi peradaban bangsa. Ia menuntun manusia Indonesia menjadi insan yang beriman, berilmu, beramal, dan beradab; bangsa yang bukan hanya maju secara material, tetapi juga bermartabat secara spiritual dan moral.

## KESIMPULAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi konsep manusia dalam perspektif Islam harus berangkat dari pemahaman holistik tentang hakikat manusia sebagai *'abdullāh* (hamba Allah) dan *khalīfah fi al-ardh* (wakil Tuhan di bumi). Kedua peran ini bersifat komplementer: sebagai *'abd*, manusia tunduk secara spiritual kepada kehendak Ilahi, sementara sebagai *khalīfah*, ia bertanggung jawab secara moral dan sosial untuk memakmurkan bumi dan menjaga keseimbangannya. Pemahaman integratif ini melampaui dikotomi antara spiritualitas dan rasionalitas yang selama ini memisahkan orientasi moral dari aktivitas duniawi. Dengan demikian, martabat manusia tidak bersifat statis atau bawaan semata, tetapi merupakan potensi (*ahsani taqwīm*) yang harus diaktualisasikan melalui kesadaran ibadah dan tanggung jawab kekhalifahan dalam seluruh aspek

kehidupan. Dalam konteks kebangsaan Indonesia, rekonstruksi ini relevan untuk menjawab problem degradasi moral, korupsi, intoleransi, serta kerusakan lingkungan yang kian meluas. Karena rendahnya kesadaran spiritual dan etika publik memiliki korelasi langsung dengan meningkatnya perilaku koruptif di kalangan aparatur negara dan generasi muda, menandakan lemahnya dimensi *muraqabah* (kesadaran pengawasan Ilahi) dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, krisis ekologis mengonfirmasi bahwa hilangnya kesadaran kekhalfahan manusia atas bumi telah menyebabkan eksploitasi sumber daya alam tanpa tanggung jawab moral, yang pada gilirannya meruntuhkan martabat kemanusiaan kolektif bangsa. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep manusia dalam Islam perlu dipahami sebagai proyek etis dan teologis sekaligus sosial-ekologis yang membangun kesadaran integral antara *'ibādah* (pengabdian kepada Tuhan) dan *'imārah* (pemakmuran bumi). Dalam konteks pendidikan nasional, hal ini dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai kekhalfahan dan tanggung jawab moral ke dalam kurikulum karakter, yang menekankan pentingnya penguatan profil pelajar Pancasila berbasis spiritualitas Islam agar manusia Indonesia menjadi *shālih* secara individu dan *muslih* secara sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa pendidikan Islam harus menumbuhkan kesalehan sosial sebagai perwujudan dari kesalehan individu. Dalam ranah kebijakan publik, rekonstruksi ini menuntut paradigma pembangunan yang menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai inti kebijakan negara, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Pemimpin dan aparatur negara dituntut untuk menjadikan sifat-sifat Ilahi seperti *al-'adl* (adil) dan *ar-rahmān* (pengasih) sebagai etika kepemimpinan. Nilai-nilai ilahiah harus diterjemahkan menjadi prinsip moral dalam tata kelola masyarakat. Dengan demikian, rekonstruksi konsep manusia dalam Islam tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi menjadi fondasi praksis bagi pembangunan bangsa yang berlandaskan nilai ketuhanan, keadilan, dan keberlanjutan. Kajian ini memperlihatkan bahwa penguatan martabat bangsa Indonesia menuntut perubahan paradigma dari sekadar pembangunan material menuju pembangunan manusia yang berakar pada kesadaran spiritual, etika sosial, dan tanggung jawab ekologis.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. K. Riyadi. 2020. "Filsafat 'Imarah: Membangun Peradaban Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 11(2): 200–218.
- Abuddin Nata. 2016. "Rekonstruksi Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an Dan Al-Hadits." *Jurnal Edukasi Islami* 5(10): 1–15.
- Ahmad Zulkifli, S. A. Hasan. 2001. "The Relationship between Muraqabah (Mindfulness of God), Self-Control, and Deviant Behavior among Muslim Adolescents." *Journal of Religion and Health* 60(4): 2801–17.
- Aquinas, Thomas. 2020. *Summa Theologica: Selections on Human Nature and Law*. New York:

Paulist Press.

Aristoteles. 1986. *De Anima (On the Soul)*. London: Penguin Classic.

Descartes, Rene. 1993. *Meditations on First Philosophy*. Indianapolis: Hackett Publishing.

Fauziyah, N. 2023. "Eksistensialisme Dan Krisis Makna Manusia Modern." *Jurnal Filsafat dan Humaniora* 15(1): 55–72.

Fazlur Rahman. 1983. "Some Key Ethical Concepts of the Qur'an." *The Journal of Religious Ethics* 11(2): 170–85.

Fithriani, L. 2022. "Etos Kerja Wirausaha Muslim: Studi Tentang Internalisasi Nilai Ibadah Dan Konsep 'Imarah Al-Ardh." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8(1): 78–95.

Ghazali, Al. 2005. *Ihya' 'Ulum Al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Hakim, Lukman. 2021. "Ekoteologi Islam: Solusi Alternatif Bagi Krisis Lingkungan Di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Lingkungan* 7(2): 150–65.

Heidegger, Martin. 1962. *Being and Time*. Oxford: Basil Blackwell.

Ismail Raji Al-Faruqi. 1992. *Al-Tawhid: Its Implications for Thought and Life*. Herndon: International Institute of Islamic Thought.

Jeremy Menchik. 2016. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kamali, Muhammad Hasyim. 2011. *The Parameters of Halal and Haram in Shari'ah and the Halal Industry*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia.

Kant, Immanuel. 2002. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. New Haven: Yale University Press.

M. Ahyani. 2020. "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Manusia Di Bumi." *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5(1): 45–60.

Mansfield, Nick. 2000. *Subjectivity: Theories of the Self from Freud to Haraway*. New York: New York University Press.

Michel Foucault. 1970. *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. New York: Vintage Books.

Sari, M., and R. Pratama. 2022. "Internalisasi Nilai Ukhuwah Islamiyah Dan Wathaniyah Sebagai Upaya Deradikalisasi Di Kalangan Pelajar." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 19(1): 89–104.

Seyyed Hossein Nasr. 2016. *Knowledge and the Sacred*. New York: State University of New York Press.

Y. Nurhidayat. 2023. "Integrasi Nilai-Nilai Khalifah Fil Ard Dalam Kurikulum Pendidikan Karakter Untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila." *Jurnal Pendidikan Karakter* 14(1): 1–15.

Yusuf Al Qardhawi. 2001. *Fiqh Al-'Ibadah*. Kairo: Dar al Shuruq.